

Majalah Digital Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur



ASPIRASI *kita*

Edisi 18

Monthly Report

Fraksi PKS DPRD JATIM

Jejak Pengabdian Fraksi PKS
DPRD Provinsi Jawa Timur

JUNI 2026

Daftar Isi

Sampul Halaman	1
Daftar Isi	2
Profil Singkat Dewan	3
Ringkasan Kinerja Fraksi	4 - 28
Kiprah Dewan	29 - 56
Galeri Foto Kegiatan	57 - 62
Penutup	63





PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2029

DR. AGUS CANYONO SHL, MHI.

WAKIL KETUA KOMISI A DPRD
JATIM, ANGGOTA FRAKSI PKS

DR. H. PUGUH WILJI PAMUNGKAS, MM

ANGGOTA KOMISI E DPRD JATIM,
SEKRETARIS FRAKSI PKS

NI. LILIK HENDARWATI, S.AK

ANGGOTA KOMISI C DPRD JATIM,
KETUA FRAKSI PKS

DRS.H.M. KHUSNUL KHULUK

ANGGOTA KOMISI E DPRD JATIM,
ANGGOTA FRAKSI PKS

KARISANDI SAVARI, S.PT., S.T

ANGGOTA KOMISI D DPRD JATIM,
BENDAHARA FRAKSI PKS

Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Juni 2026:



Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Selasa, 9 Juni 2026

1. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.
2. Perubahan Ketiga atas Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Timur Tahun 2026; dan
3. Penyampaian Penjelasan Pimpinan Komisi E (Kesra) atas Rancangan Perda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Juni 2026:



Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Senin, 15 Juni 2026

1. Penyampaian Pendapat Gubernur atas Rancangan Perda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas; dan
2. Rapat Paripurna Internal DPRD, Penyampaian Penjelasan Pengusul atas Rancangan Perda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.



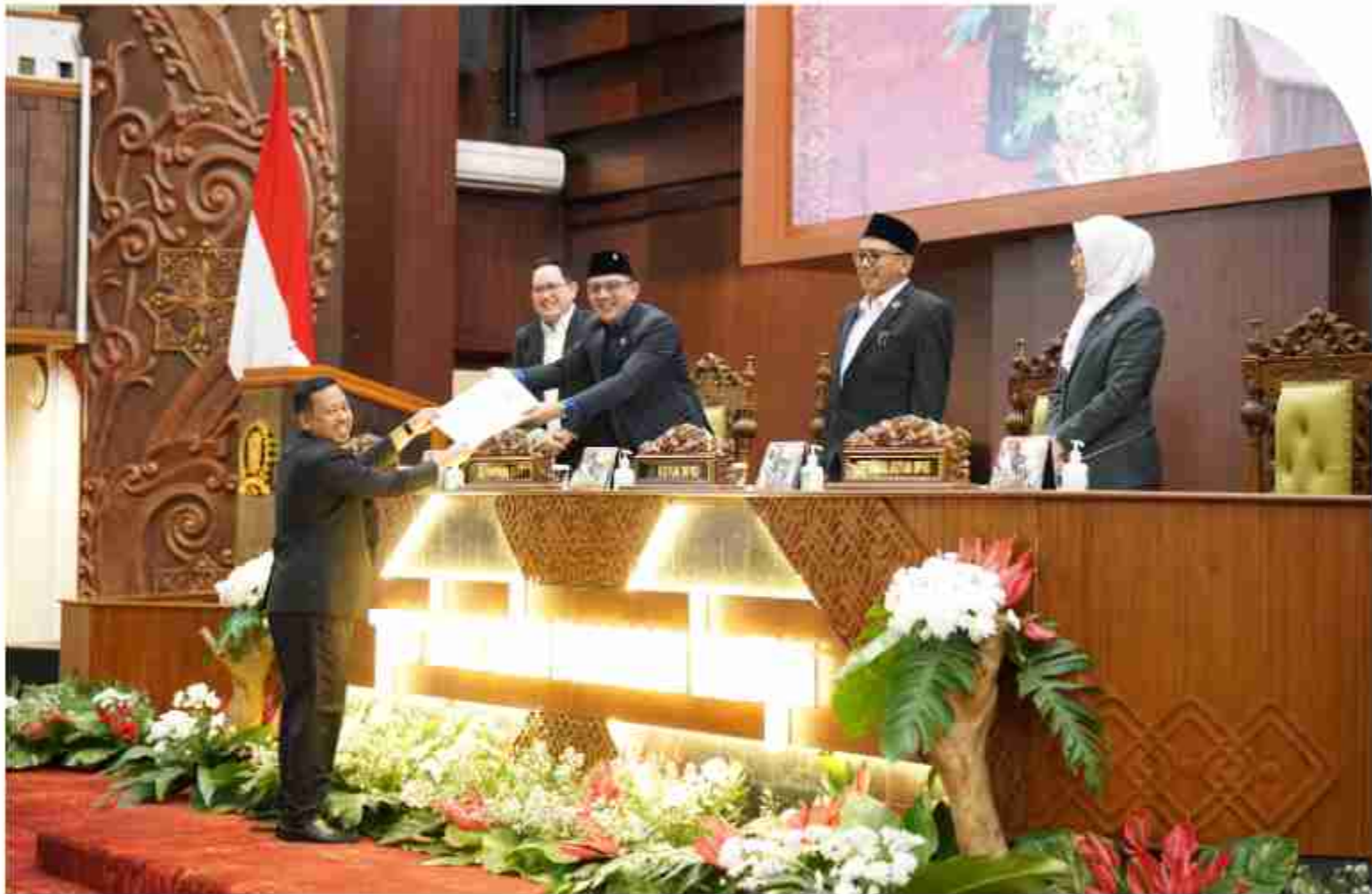
Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



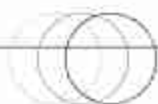
Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Juni 2026:



Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Rabu, 17 Juni 2026

1. Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi atas Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas
2. Penyampaian Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya atas Rancangan Perda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Juni 2026:



Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Rabu, 22 Juni 2026

1. Penyampaian Nota Keuangan oleh Gubernur terkait Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025
2. Penyampaian Laporan Pembahasan oleh Komisi C (Perekonomian) atas Hasil Pembahasan Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur
3. Penyampaian Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya atas Rancangan Perda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
4. Persetujuan Penetapan Rancangan Perda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi Rancangan Perda Inisiatif DPRD
5. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Perda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



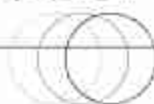
Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Juni 2026:



Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Rabu, 25 Juni 2026

1. Penyampaian Pendapat Banggar atas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
2. Penyampaian Saran dan Pendapat oleh Badan Anggaran terkait Pokok - Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027;
3. Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pengganti Antarwaktu Sisa Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029; dan
4. Perubahan Susunan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur.



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



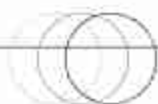
Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Juni 2026:



Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Rabu, 29 Juni 2026

1. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
2. Penyampaian Penjelasan Pansus atas Rancangan Perda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



Recap 2-11 Juni 2026

Agenda Komisi dan Badan

Badan Anggaran DPRD Jawa Timur berdiskusi dengan ditjen bina pembangunan daerah dan BPSDM KEMENDAGRI untuk mengoptimalkan penyampaian aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran dprd pelaksanaan reses dan penguatan kapasitas kelembagaan dprd di jawa timur 02-05 Juni 2026



Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar diskusi strategis dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta guna memperkuat raperda tentang penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Jakarta Kamis 11 Juni 2026

Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo guna membahas penanganan sektor pertambangan dikawasan Ngebel Kamis 11 Juni 2026



- Komisi C Provinsi Jawa Timur bersama UPT.BAPPENDA Provinsi Jawa Timur Probolinggo melaksanakan pertemuan guna membahas pemantauan penerimaan PAD Kamis 11 Juni 2026
- Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar diskusi strategis bersama dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat guna membahas program sapa warga dan Jabar Super APPS sebagai upaya memperkuat komunikasi publik meningkatkan akses layanan masyarakat serta mendorong literasi digital di Jawa Timur Kamis 11 Juni 2026

Recap 12-18 Juni 2026

Agenda Komisi dan Badan



Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan pertemuan strategis bersama PT. Transportasi Jakarta Kamis 18 Juni 2026. Untuk membahas pengelolaan transportasi umum



Recap 26 - 30 Juni 2026

Agenda Komisi dan Badan

Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar diskusi strategis DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPMPTSP membahas peran DPRD dalam meningkatkan investasi daerah di Semarang Rabu-Sabtu 17-20 Juni 2026



Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar pertemuan bersama UPT.Instalasi Perikanan Budidaya Pandaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Selasa 23 Juni 2026

Komisi D Provinsi Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi transportasi laut di pelabuhan tanjung tembaga Probolinggo yang merupakan wilayah kerja UPT.Pelabuhan Pengumpan regional banyuwangi Selasa 23 Juni 2026





Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar forum diskusi bersama DPRD DIY guna membahas pengaturan jaminan produk halal bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Yogyakarta Jum'at, 26 Juni 2026

Komisi B bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak Dinas Peternakan Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan menggelar Forum terbuka bersama peternak telur guna membahas anjloknya harga telur di pasar di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Senin 29 Juni 2026

Pansus hak keuangan DPRD Provinsi Jawa Timur melaksanakan pertemuan strategis bersama direktorat produk hukum daerah dan direktorat perencanaan anggaran daerah kementerian dalam Negeri RI di Jakarta Senin sampai Kamis 29 Juni 2026



Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi Jawa Timur, Harisandi Savari, mendorong penguatan sistem pendataan penyandang disabilitas yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan yang tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Harisandi dalam Tanggapan FPKS atas Pendapat Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (17/6/2026).

Harisandi mengatakan, hadirnya Raperda ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan Jawa Timur yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, besarnya jumlah penyandang disabilitas menunjukkan bahwa isu disabilitas bukan persoalan sektoral semata, tetapi merupakan bagian penting dari pembangunan manusia.

Berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jumlah penyandang disabilitas menurut BPS tahun 2020 mencapai 3,42 juta jiwa atau 8,41 persen penduduk Jawa Timur. Sementara berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga Agustus 2025 tercatat sebanyak 1,86 juta jiwa penyandang disabilitas.

**DATA AKURAT
JADI KUNCI
PEMBERDAYAAN
PENYANDANG
DISABILITAS,
FRAKSI PKS JATIM:
JANGAN SAMPAI
ADA YANG
TERTINGGAL**



"Jumlah ini menunjukkan bahwa kebijakan terhadap penyandang disabilitas harus menjadi perhatian seluruh sektor pembangunan daerah. Kita membutuhkan data yang akurat agar intervensi program pemerintah benar-benar tepat sasaran," ujar Harisandi. Ia menegaskan, pendataan penyandang disabilitas tidak boleh hanya menjadi kegiatan administratif. Data harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap penyandang disabilitas memperoleh hak dan akses terhadap program pemerintah. "Data bukan sekadar angka statistik. Data harus memastikan mereka teridentifikasi, program memastikan mereka terlayani, dan pemberdayaan memastikan mereka mampu mandiri," tegasnya.

Harisandi juga mengapresiasi berbagai program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung penyandang disabilitas, mulai rehabilitasi sosial, bantuan sosial, asistensi sosial, pendidikan inklusif, pelatihan vokasional, kewirausahaan, fasilitasi penempatan kerja, hingga peningkatan akses layanan publik. Namun menurutnya, program pemberdayaan perlu terus diperkuat agar tidak hanya bersifat bantuan, tetapi mampu mendorong kemandirian. "Paradigma pemberdayaan harus bergerak dari sekadar memberikan bantuan menuju penguatan kapasitas. Penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk produktif, mandiri, dan berkontribusi," jelas Harisandi.

FPKS juga mendorong optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar semakin mampu memberikan dampak nyata dalam peningkatan keterampilan, penyerapan kerja, dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Selain itu, Harisandi mendorong percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) sehingga kebijakan lintas sektor memiliki target, indikator keberhasilan, dukungan anggaran, serta evaluasi yang jelas. "Prinsipnya, jangan sampai ada satu pun penyandang disabilitas di Jawa Timur yang tertinggal. Pembangunan harus memastikan semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk maju," tegasnya.

Menurut Harisandi, penyandang disabilitas harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat sebagaimana paradigma baru yang akan ditetapkan dalam Raperda. "Penyandang disabilitas memiliki hak, kemampuan, dan kesempatan yang sama. Tugas kita memastikan hadirnya sistem yang memberikan ruang agar mereka bisa mandiri, berkarya, dan ikut membangun Jawa Timur," pungkas Harisandi.

Penyandang disabilitas memiliki hak, kemampuan, dan kesempatan yang sama. Tugas kita memastikan hadirnya sistem yang memberikan ruang agar mereka bisa mandiri, berkarya, dan ikut membangun Jawa Timur.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)





RENDAHNYA SERAPAN BELANJA PEGAWAI DAN INFRASTRUKTUR JADI SOROTAN, FPKS DPRD JATIM MINTA EVALUASI MENYELURUH

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Timur menyoroti masih rendahnya realisasi belanja pegawai serta belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi dalam pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. FPKS menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius agar kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal.

Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara FPKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (29/6/2026).

Puguh menjelaskan, Fraksi PKS mencermati realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp31,20 triliun atau 93,82 persen dari total anggaran sebesar Rp33,25 triliun. Meski sebagian besar program telah terlaksana, masih terdapat sekitar Rp2,05 triliun anggaran yang belum terserap.



"Secara umum tingkat realisasi tersebut menunjukkan sebagian besar program telah berjalan. Namun masih terdapat anggaran lebih dari Rp2 triliun yang belum terealisasi. Hal ini perlu dievaluasi secara komprehensif agar diketahui faktor-faktor penyebabnya dan tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya," ujar Puguh. FPKS juga mencatat bahwa tingkat realisasi belanja tahun 2025 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 96,14 persen. Penurunan serapan tersebut dinilai menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Selain itu, Fraksi PKS memberikan perhatian khusus terhadap realisasi Belanja Pegawai yang hanya mencapai 89,56 persen.

Menurut Puguh, pemerintah perlu menjelaskan penyebab rendahnya serapan tersebut sekaligus memastikan belanja pegawai benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. "Belanja Operasi merupakan komponen terbesar dalam struktur APBD. Karena itu efisiensi belanja rutin harus terus ditingkatkan, tetapi rendahnya realisasi belanja pegawai juga perlu mendapat penjelasan agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya. Di sektor pembangunan fisik, Fraksi PKS mengapresiasi realisasi Belanja Modal yang mencapai 92,47 persen. Namun, FPKS menilai masih terdapat pekerjaan rumah pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang realisasinya baru mencapai 86,64 persen atau menjadi yang terendah dibanding komponen belanja modal lainnya.

Menurut Puguh, pembangunan infrastruktur dasar memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung pelayanan publik. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal. "Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi merupakan investasi jangka panjang bagi masyarakat. Serapannya perlu terus ditingkatkan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh Jawa Timur," tegasnya.

FPKS juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran pada tahun-tahun mendatang. "Kami berharap pembahasan pertanggungjawaban APBD ini tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," pungkash Puguh.

"Masih terdapat anggaran lebih dari Rp2 triliun yang belum terealisasi. Hal ini perlu dievaluasi secara komprehensif agar tidak terulang. Pembahasan ini harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat."

*Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM
Anggota Komisi E DPRD Jatim,
Sekretaris Fraksi PKS*



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Timur meminta penjelasan komprehensif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait sejumlah indikator keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Mulai dari realisasi defisit anggaran yang jauh lebih rendah dari target, penurunan nilai aset daerah, berkurangnya investasi jangka panjang, hingga berubahnya surplus operasional pada 2024 menjadi defisit operasional pada 2025.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (29/6/2026). Puguh menjelaskan, Fraksi PKS mencermati realisasi pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp29,88 triliun, sementara realisasi belanja mencapai Rp31,20 triliun sehingga terjadi defisit sebesar Rp1,31 triliun. Nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan defisit yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp4,69 triliun.

Menurutnya, kondisi tersebut memang menunjukkan perkembangan positif dari sisi kinerja fiskal. Namun, pemerintah tetap perlu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan realisasi defisit berbeda cukup jauh dari perencanaan awal. "Fraksi PKS memandang penurunan defisit anggaran merupakan perkembangan yang positif. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menjelaskan secara komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan realisasi defisit jauh lebih rendah dibandingkan yang telah direncanakan dalam APBD," ujar Puguh.

FPKS DPRD Jatim Soroti Defisit APBD, Penurunan Aset Daerah hingga Berubahnya Surplus Operasional Menjadi Defisit

DEFICIT

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti kondisi neraca keuangan daerah. Berdasarkan laporan keuangan, total aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp54,11 triliun atau menurun sekitar Rp748,58 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya aset lancar, termasuk kas dan setara kas, piutang pendapatan, serta persediaan. Di sisi lain, investasi jangka panjang juga mengalami penurunan, terutama akibat menurunnya nilai investasi permanen.

"Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penurunan aset tersebut, sekaligus strategi untuk mengoptimalkan aset daerah agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelayanan publik, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya. Tak hanya itu, FPKS juga memberikan perhatian terhadap Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Fraksi PKS mencatat adanya penurunan pendapatan operasional yang berdampak pada berubahnya surplus operasional sebesar Rp2,45 triliun pada tahun 2024 menjadi defisit operasional sebesar Rp636,4 miliar pada tahun 2025.

Menurut Puguh, perubahan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar DPRD memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi fiskal daerah. "Fraksi PKS memahami bahwa kondisi tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kebijakan fiskal nasional, perubahan kebijakan akuntansi, hingga dinamika ekonomi. Namun perubahan indikator tersebut tetap perlu menjadi perhatian bersama sebagai sinyal untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah ke depan," jelasnya.

Selain perubahan surplus menjadi defisit operasional, Fraksi PKS juga mencatat penurunan ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta menurunnya arus kas bersih dari aktivitas operasi dan kas daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, FPKS meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelaskan strategi yang akan ditempuh untuk menjaga efektivitas pelaksanaan APBD sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi. "Fraksi PKS berharap seluruh catatan ini dapat dijawab secara komprehensif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," pungkas Puguh.

*Perubahan indikator dari **surplus menjadi defisit operasional** ini perlu menjadi perhatian bersama sebagai **sinyal untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah**. Catatan ini harus dijawab secara komprehensif sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.*



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



LILIK HENDARWATI AJAK PERKUAT KETAHANAN KELUARGA DAN PENDIDIKAN KARAKTER USAI TERBONGKARNYA GRUP LGBT DI SURABAYA TIMUR

Terbongkarnya sebuah grup media sosial di kawasan Surabaya Timur yang diduga berkaitan dengan aktivitas perilaku seksual menyimpang, seperti Gay menjadi perhatian berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Surabaya, Lilik Hendarwati, mengajak masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga, pendidikan karakter, dan nilai-nilai moral sebagai benteng menghadapi berbagai pengaruh negatif di era digital. Menurut Lilik, fenomena yang muncul di ruang digital perlu disikapi secara bijak dengan mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan.

"Sebagai wakil rakyat, saya mengajak seluruh masyarakat Surabaya untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai agama, moral, budaya, dan ketahanan keluarga yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut. Lilik menilai perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru yang harus dihadapi secara bersama-sama. Karena itu, masyarakat perlu memiliki

kemampuan menyaring berbagai informasi, kampanye, maupun gaya hidup yang beredar di media sosial. "Di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh global, kita perlu lebih bijak dalam menyaring berbagai kampanye dan gaya hidup yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia," katanya.

Menurutnya, langkah yang lebih penting saat ini adalah memperkuat pendidikan karakter dan akhlak, khususnya bagi generasi muda. Ia menegaskan bahwa keluarga tetap menjadi lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian anak. "Yang perlu kita kuatkan adalah edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya membangun keluarga yang sehat, menjaga akhlak, memperkuat pendidikan karakter, serta menciptakan lingkungan sosial yang positif," ujarnya.

Legislator PKS tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mendampingi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai tren yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Menurutnya, tanggung jawab pembinaan tidak hanya berada di pundak keluarga, tetapi juga membutuhkan keterlibatan sekolah, tokoh agama, pemerintah, hingga lingkungan sosial di sekitar anak-anak dan remaja.

"Sinergi dan kolaborasi antara orang tua, sekolah, tokoh agama, dan pemerintah harus hadir bersama memberikan pendampingan agar anak-anak kita tumbuh dengan jati diri yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai tren yang belum tentu sesuai dengan nilai bangsa," jelasnya. Lilik juga mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada sikap saling menyalahkan atau stigmatisasi. Sebaliknya, ia mendorong penyelesaian persoalan sosial dilakukan melalui pendekatan yang konstruktif dan edukatif.

"Mari kita hadapi persoalan ini dengan mengutamakan dialog, edukasi, dan pembinaan yang baik mulai dari keluarga sampai lingkup masyarakat di semua tingkatan," pungkasnya. Menurut Lilik, penguatan ketahanan keluarga dan pendidikan karakter menjadi investasi jangka panjang yang penting untuk menjaga kualitas generasi penerus sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat Surabaya di tengah berbagai tantangan zaman.

Sinergi antara orang tua, sekolah, tokoh agama, dan pemerintah harus hadir bersama memberikan pendampingan agar anak-anak kita tumbuh dengan jati diri yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai tren negatif.

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)





PUGUH WIJI PAMUNGKAS SOROTI MANDEKNYA TPG GURU, KOMISI E PANGGIL OPD TERKAIT

Komisi E DPRD Jawa Timur menerima audiensi Forum Komunikasi TPG Jawa Timur yang mewakili guru ASN SMA, SMK, dan SLB dari berbagai daerah di Jawa Timur, Selasa (9/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan aspirasi terkait belum terealisasinya pembayaran tambahan penghasilan yang berasal dari komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG), termasuk THR dan gaji ke-13 tahun 2025. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, yang juga hadir menemui para guru itu mengatakan persoalan tersebut perlu segera mendapatkan perhatian serius karena menyangkut hak ribuan guru yang selama ini telah menjalankan tugas pendidikan di Jawa Timur.

"Hari ini saya bersama pimpinan dan anggota Komisi E menerima audiensi dari Forum Komunikasi TPG Jawa Timur. Salah satu substansi yang mereka sampaikan adalah kejelasan pembayaran TPG guru SMA dan SMK di Jawa Timur yang di dalamnya mencakup THR dan gaji ke-13," Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu. Menurutnya, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk pembayaran TPG yang mencakup THR dan gaji ke-13. Kondisi ini membuat sekitar 35 ribu guru ASN SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur hingga kini belum menerima hak mereka. "Ini yang kemudian menimbulkan kekecewaan di kalangan guru. Mereka merasa hak-haknya belum tertunaikan, padahal secara regulasi dasar hukumnya sudah sangat jelas," katanya.

Puguh menjelaskan, dasar hukum pembayaran TPG tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Ia juga menyayangkan belum adanya komunikasi yang memadai dari pihak terkait kepada para guru mengenai persoalan tersebut. "Yang cukup disayangkan adalah tidak adanya pemberitahuan atau klarifikasi sejak awal kepada para guru. Akibatnya muncul polemik dan kegaduhan di kalangan guru karena mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh terkait persoalan ini," ujarnya.

Dalam audiensi itu turut hadir perwakilan Dinas Pendidikan Jawa Timur, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Komisi E memanfaatkan forum tersebut untuk menggali akar persoalan sekaligus mencari solusi yang memungkinkan. Sebagai tindak lanjut, Komisi E DPRD Jawa Timur berencana memanggil dan menggelar rapat koordinasi lintas OPD guna membahas berbagai opsi penyelesaian. "Kita akan mengundang biro hukum, inspektorat, Dinas Pendidikan, BPKAD, Bappeda, TAPD, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas secara mendalam kemungkinan solusi yang bisa ditempuh," kata legislator PKS tersebut.

Menurut Puguh, terdapat dua jalur yang saat ini sedang dijajaki. Pertama, mendorong pemerintah daerah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan kemungkinan pencairan dana melalui skema yang selama ini digunakan, yakni bersumber dari APBN melalui DAU. "Kami mendorong BPKAD untuk berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, apakah masih memungkinkan pembayaran TPG ini dilakukan melalui skema yang selama ini berlaku dari pemerintah pusat," jelasnya.

Sementara itu, opsi kedua adalah mengkaji kemungkinan penggunaan APBD Jawa Timur apabila jalur pendanaan dari pusat tidak dapat dilakukan. Puguh mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sekitar Rp600 miliar. Sementara kebutuhan anggaran untuk pembayaran TPG tahun 2025 yang belum terbayarkan diperkirakan mencapai Rp275 miliar. "Secara kemampuan fiskal sebenarnya masih memungkinkan. Namun kita harus memastikan terlebih dahulu dasar hukum dan mekanisme penggunaannya agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," tegasnya.

Ia menambahkan, Komisi E berkomitmen mengawal persoalan tersebut hingga ditemukan jalan keluar yang terbaik bagi para guru. "Guru memiliki peran yang sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan. Hak-hak mereka juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, kita harus mencari solusi terbaik agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah," ujarnya. Puguh berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dapat duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan memberikan kepastian kepada para guru. "Yang terpenting adalah menemukan win-win solution. Guru membutuhkan kepastian atas hak mereka, dan pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi atas persoalan ini," pungkasnya.

"Secara kemampuan fiskal sebenarnya masih memungkinkan. Namun kita harus memastikan terlebih dahulu dasar hukum dan mekanisme penggunaannya. Guru memiliki peran yang sangat vital, kita harus mencari win-win solution."

TPG GURU

BELUM CAIR

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Surabaya mulai memicu keresahan masyarakat. Antrean kendaraan terlihat mengular di beberapa SPBU, sementara sebagian warga terpaksa beralih menggunakan Pertamina akibat stok Pertalite yang kosong. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Surabaya, Lilik Hendarwati.

Menurut Lilik, gangguan pasokan Pertalite tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan kendaraan operasional setiap hari. "Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil yang setiap hari bergantung pada ketersediaan BBM untuk bekerja dan beraktivitas," kata Lilik.

Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU di Surabaya, di antaranya kawasan Bratang, Nginden, dan beberapa titik lainnya. Berdasarkan keterangan petugas SPBU, kekosongan Pertalite disebabkan keterlambatan pengiriman pasokan dari Pertamina. Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi Kota Surabaya yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa di Jawa Timur.

"Surabaya merupakan kota perdagangan dan jasa yang pergerakan ekonominya sangat dinamis. Ketika distribusi Pertalite terganggu, maka mobilitas masyarakat ikut tersendat. Aktivitas usaha, distribusi barang, hingga pelayanan kepada konsumen menjadi kurang optimal," ujarnya.

PERTALITE KOSONG DI SEJUMLAH SPBU, LILIK DPRD JATIM INGATKAN ANCAMAN BAGI PELAKU UMKM



Lilik mengingatkan bahwa dampak paling besar justru dirasakan kelompok masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari aktivitas harian di lapangan, seperti pengemudi ojek online, kurir, pedagang keliling, hingga pelaku UMKM. "Kasihan para pengemudi ojek online, kurir, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal lainnya. Peralite bukan sekadar bahan bakar, tetapi modal utama untuk mencari nafkah bagi mereka," tegasnya.

Menurutnya, waktu yang terbuang akibat harus mengantre berjam-jam di SPBU secara langsung mengurangi produktivitas dan kesempatan memperoleh penghasilan. "Ketika mereka harus mengantre lama atau bahkan tidak mendapatkan Peralite, artinya kesempatan mencari nafkah juga berkurang. Ini tentu berdampak pada pendapatan keluarga mereka," katanya.

Lilik meminta Pertamina dan seluruh pihak terkait segera memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai penyebab keterlambatan distribusi yang terjadi. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan yang berkepanjangan. "Saya meminta Pertamina dan seluruh pihak terkait untuk segera memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai penyebab keterlambatan pasokan, sekaligus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya," ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong percepatan distribusi dan pemerataan pasokan Peralite ke seluruh SPBU di Surabaya, khususnya pada titik-titik dengan tingkat konsumsi tinggi. "Antisipasi harus dilakukan lebih dini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan pelayanan yang baik," katanya.

Lilik berharap persoalan ini dapat segera ditangani sehingga masyarakat kembali memperoleh akses BBM dengan mudah dan roda perekonomian Surabaya tetap bergerak normal. "Kita ingin masyarakat bisa memperoleh BBM dengan mudah, bekerja dengan tenang, dan roda perekonomian Surabaya tetap bergerak dengan baik. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian persoalan ini," pungkasnya.

"Kita ingin masyarakat bisa memperoleh BBM dengan mudah, bekerja dengan tenang, dan roda perekonomian Surabaya tetap bergerak dengan baik. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian persoalan ini,"

Hj. Lilik Hendarwati, S.Ak
Anggota Komisi C DPRD Jatim,
Ketua Fraksi PKS

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melakukan langkah mitigasi menyusul munculnya informasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sejumlah perusahaan di Jawa Timur. Peringatan tersebut disampaikan Puguh menanggapi pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal yang mengungkapkan adanya potensi PHK di dua perusahaan akibat relokasi produksi oleh perusahaan induk yang berbasis di Jepang.

Menurut Puguh, ancaman PHK yang berpotensi terjadi di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kedua perusahaan tersebut berencana mengalihkan fokus bisnis ke pengembangan komponen kendaraan listrik. Produksi selanjutnya direncanakan dipindahkan ke Vietnam yang dinilai lebih mendukung pengembangan industri kendaraan listrik. Bila hal itu terjadi ribuan orang pekerja akan terdampak PHK. "Ancaman terjadinya PHK di Jawa Timur ini tidak boleh dianggap enteng. Ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, maka mereka juga kehilangan sumber penghasilan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh keluarga pekerja, tetapi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian daerah," kata Puguh.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu menjelaskan, melemahnya daya beli akibat PHK massal berpotensi menekan aktivitas ekonomi masyarakat. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi tersebut dapat memicu persoalan sosial yang lebih luas. "Ketika masyarakat kehilangan pendapatan, daya beli akan turun. Kalau daya beli turun, tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan aktivitas usaha di daerah. Ini yang harus diwaspadai bersama," ujarnya. Puguh menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus segera menindaklanjuti informasi tersebut sebelum PHK benar-benar terjadi.

Menurutnya, langkah antisipatif jauh lebih penting dibanding menunggu persoalan berkembang menjadi krisis ketenagakerjaan. "Saya mendorong Pemprov Jatim untuk segera melakukan langkah-langkah mitigasi. Mumpung ini masih berupa informasi dan peringatan dini, pemerintah harus bergerak cepat agar memiliki skenario penanganan yang jelas jika PHK benar-benar terjadi," tegasnya. Puguh mengusulkan pembentukan Satgas PHK sebagai salah satu langkah strategis untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul.

ANCAMAN PHK DI JATIM MENGUAT, PUGUH DPRD MINTA PEMPROV SIAPKAN MITIGASI DAN SATGAS PERLINDUNGAN PEKERJA



Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan pendataan pekerja terdampak agar mereka bisa segera mendapatkan akses pekerjaan baru maupun program peningkatan keterampilan. "Satgas PHK perlu dipertimbangkan. Kemudian pemerintah juga harus melakukan pendataan pekerja terdampak dan menyiapkan berbagai alternatif solusi, termasuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jatim agar mereka memiliki keterampilan baru dan bisa kembali bekerja atau bahkan mandiri berwirausaha," jelasnya.

Menurut Puguh, keberadaan BLK harus dioptimalkan sebagai instrumen penyelamatan tenaga kerja ketika terjadi gelombang PHK. Dengan peningkatan kompetensi, pekerja terdampak dapat lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan industri baru yang terus berkembang. Selain menyiapkan langkah mitigasi, Puguh juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja apabila PHK benar-benar tidak dapat dihindari. Ia meminta pemerintah memastikan seluruh kewajiban perusahaan terhadap pekerja dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. "Yang tidak kalah penting adalah memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi.

BPJS Ketenagakerjaan, pesangon, tabungan hari tua, dan hak-hak lainnya harus dikawal agar tidak ada pekerja yang dirugikan," katanya. Puguh berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak cepat untuk mengantisipasi potensi PHK tersebut sehingga dampaknya terhadap masyarakat Jawa Timur dapat diminimalkan.

Jangan sampai ketika PHK terjadi, pemerintah baru mencari solusi. Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah antisipasi dan perlindungan sejak awal agar masyarakat tidak menjadi korban dari gejolak ekonomi dan industri yang sedang berlangsung.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur
Anggota Komisi X DPR RI
Puguh Nugroho

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Ancaman musim kemarau panjang yang diprediksi melanda Pulau Madura dalam beberapa bulan ke depan mendapat perhatian serius Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari. Legislator PKS tersebut mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten di Madura untuk segera menyiapkan langkah antisipasi, terutama terkait ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Menurut Harisandi, potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026 tidak boleh dianggap sebagai persoalan musiman biasa. Jika tidak diantisipasi sejak awal, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas ekonomi warga.

"BPBD Jawa Timur dan pemerintah daerah setempat harus segera memetakan kawasan yang berpotensi mengalami krisis air bersih dan menyiapkan langkah penyediaan air bagi masyarakat," kata Harisandi. Ketua Kadin Pamekasan itu menilai wilayah Madura menjadi salah satu kawasan yang paling rentan terdampak kekeringan karena keterbatasan sumber air dan karakteristik geografis yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Jawa Timur. Ia mengingatkan bahwa ancaman kekeringan panjang dapat berdampak pada ratusan ribu kepala keluarga di Madura apabila pemerintah tidak melakukan mitigasi secara cepat dan terukur. Selain meminta kesiapan pemerintah, Harisandi juga mengajak masyarakat untuk mulai melakukan penghematan penggunaan air sejak sekarang.

Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung cukup panjang. "Kami mengimbau masyarakat Madura untuk menghemat penggunaan air dan mulai bersiap menghadapi potensi kekeringan sejak dini. Jangan menunggu sampai kondisi krisis terjadi," ujarnya. Peringatan tersebut sejalan dengan prediksi dari BMKG Trunojoyo Sumenep yang memperkirakan cuaca di Pulau Madura akan semakin kering dalam beberapa bulan mendatang.

**Ancaman
Kekeringan
Mengintai
Madura,
Harisandi Desak
Pemprov Segera
Siapkan Air
Bersih**

Kondisi tersebut dipicu oleh menguatnya angin timuran yang bertiup dari Benua Australia. Fenomena ini menyebabkan pembentukan awan hujan semakin berkurang sehingga intensitas penyinaran matahari pada siang hari menjadi lebih tinggi, sementara suhu udara pada malam hari cenderung lebih dingin karena pelepasan panas berlangsung lebih cepat.

Berdasarkan prediksi BMKG, kondisi kemarau diperkirakan terus berlangsung dan mencapai puncaknya pada periode Juli hingga September 2026. Harisandi menilai momentum saat ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat langkah mitigasi, mulai dari pemetaan daerah rawan, penyediaan tandon air, penyiapan armada distribusi air bersih, hingga koordinasi lintas instansi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat ketika terjadi krisis. "Jangan sampai saat masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air bersih, pemerintah baru bergerak. Antisipasi harus dilakukan sekarang agar dampaknya bisa diminimalkan," tegasnya. Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPBD, PDAM, serta seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan kebutuhan air bersih masyarakat Madura tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. "Air adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kesiapsiagaan menghadapi kekeringan harus menjadi prioritas bersama," pungkasnya.

"Jangan sampai saat masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air bersih, pemerintah baru bergerak. Antisipasi harus dilakukan sekarang agar dampaknya bisa diminimalkan. Air adalah kebutuhan dasar."

*Harisandi Savari, S.Pt., S.T
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Bendahara Fraksi PKS*



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Harisandi Apresiasi Kolaborasi PWI dan Seniman Lokal di Pamekasan, Sebut Pelukis Penjaga Peradaban



SURABAYA (Lentera) - Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengamankan hak Participating Interest (PI) sebesar 10 persen pada sejumlah wilayah kerja (WK) migas di Jawa Timur. Menurut Harisandi, upaya tersebut merupakan langkah strategis yang perlu dikawal secara serius karena berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi daerah penghasil migas, khususnya Pulau Madura.

"Selama ini Madura dikenal sebagai daerah penghasil migas. Sudah seharusnya masyarakat juga mendapatkan manfaat yang lebih besar dari kekayaan alam yang ada di wilayahnya. Karena itu kami mendukung langkah Pemprov Jatim melalui PT Petrogas Jatim Utama untuk memperjuangkan hak PI tersebut," ujar Harisandi, Rabu (17/6/2026). Politisi asal Madura itu menilai keberhasilan memperoleh hak PI tidak hanya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memperluas kemampuan pemerintah dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor.

"Kalau PAD meningkat, tentu ruang fiskal pemerintah juga semakin besar. Ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan bisa lebih banyak menyentuh kebutuhan warga Madura," katanya. Saat ini, terdapat tiga wilayah kerja migas yang tengah diproses untuk memperoleh hak PI, yakni WK Kangean di Kabupaten Sumenep, WK North Madura II yang dioperatori Petronas, serta WK Pangkah. Untuk WK Kangean, proses dinilai paling maju. Pembentukan Perseroan Daerah sebagai wadah pengelolaan PI telah berjalan seiring rampungnya regulasi daerah yang diperlukan. Pembahasan saat ini difokuskan pada komposisi kepemilikan saham antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Potensi pendapatan dari PI WK Kangean diperkirakan mencapai Rp6 miliar hingga Rp10 miliar per tahun yang nantinya akan dibagi antara Pemprov Jawa Timur dan pemerintah daerah penghasil sesuai ketentuan yang berlaku. Meski nilainya belum terlalu besar dibandingkan total investasi sektor migas, Harisandi menilai keberadaan PI memiliki arti penting bagi daerah karena memberikan kesempatan untuk menikmati manfaat pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

"Yang terpenting bukan hanya nilainya hari ini, tetapi keberlanjutan manfaatnya. Ketika daerah memiliki sumber pendapatan yang stabil dari sektor migas, maka pembangunan dapat direncanakan lebih baik dan berkelanjutan," ujarnya. Harisandi juga menekankan pentingnya pengelolaan PI secara profesional, transparan, dan akuntabel agar manfaat yang diperoleh benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Selain WK Kangean, proses perolehan PI juga tengah berlangsung pada WK North Madura II yang dioperasikan perusahaan migas asal Malaysia, Petronas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui badan usaha milik daerah telah menyampaikan surat minat kepada SKK Migas untuk memperoleh hak partisipasi tersebut.

Sementara itu, untuk WK Pangkah, proses masih menunggu kepastian wilayah administratif yang masuk dalam hamparan reservoir migas sebelum dilakukan perhitungan lebih lanjut terkait skema pembagian dan potensi ekonominya. Harisandi menegaskan seluruh tahapan pengurusan PI harus mendapat dukungan bersama karena berkaitan langsung dengan masa depan daerah penghasil migas di Jawa Timur, terutama Pulau Madura.

"Ini momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik. Kami berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga manfaat PI bisa segera dirasakan masyarakat. Pada akhirnya tujuan utama kita adalah meningkatkan kesejahteraan warga Madura dan daerah penghasil migas lainnya di Jawa Timur," pungkasnya.



"Wartawan dan seniman punya peran besar dalam merawat kebudayaan. Jika disinergikan, keduanya bisa menjadi kekuatan untuk memperkenalkan potensi dan identitas daerah ke tingkat yang lebih luas".

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

LENTERA.co Home EPaper Headline Trending Aktual Opini Gaya Hidup

Komisi D DPRD Jatim Dukung Perjuangan Hak PI Migas, Harisandi: Perkuat Pembangunan Madura

17 JUNE 2025



Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari.

SURABAYA (Lentera) - Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengamankan hak Participating Interest (PI) sebesar 10 persen pada sejumlah wilayah kerja (WK) migas di Jawa Timur.



SURABAYA (Lentera) – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, khususnya di Kabupaten Pacitan dan sejumlah daerah lain yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Menurut Agus, upaya mitigasi bencana harus dilakukan sejak dini melalui identifikasi titik-titik rawan kekeringan agar pemerintah maupun masyarakat dapat mempersiapkan langkah penanganan secara lebih cepat dan tepat.

"Saya pikir yang lebih penting juga peta bencana peta kekeringan, sejak awal mungkin bisa dideteksi, syukur kalau ada levelisasi, statusnya sudah bisa diprediksi, titik kekeringan ini, ini, ini, ini. Sehingga kita ketika masyarakat Jawa Timur juga mendapatkan informasi detail, mungkin secara personal juga akan secara pribadi keluarga juga akan mempersiapkan," ungkap Agus Kamis (18/6/2026). Selain pemetaan, Agus juga mendorong, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan infrastruktur pendukung untuk menghadapi potensi kekeringan. Menurutnya, ketersediaan armada distribusi air bersih menjadi faktor penting dalam penanganan darurat ketika sejumlah wilayah mulai mengalami kesulitan akses air.

"Siapkan infrastruktur untuk kekeringan, biasanya terkait dengan armada. Ketika dirasa kecukupan itu tidak mampu meng-cover titik-titik kerawanan, nanti berkoordinasi dengan BPBD di daerah Jawa Timur," katanya. Agus menilai, penanganan kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Berdasarkan pengalaman selama ini, keterlibatan masyarakat, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran signifikan dalam membantu distribusi bantuan air bersih di wilayah terdampak. "Kemudian kita pantau di beberapa kejadian kekeringan, dan keterlibatan masyarakat, lembaga, dan Ormas itu juga signifikan. Maka harapan kita pemerintah-pemerintah Jawa Timur juga bisa berkoordinasi dengan Ormas, dengan masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat untuk mengatasi itu," jelasnya.

Pacitan sendiri merupakan salah satu wilayah di selatan Jawa Timur, yang hampir setiap tahun menghadapi ancaman kekeringan saat musim kemarau panjang. Kondisi geografis dan keterbatasan sumber air membuat sejumlah kawasan di daerah tersebut kerap membutuhkan bantuan distribusi air bersih. Karena itu, DPRD Jawa Timur mendorong BPBD Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk memperbarui data titik rawan kekeringan serta memastikan distribusi air bersih dapat berjalan cepat dan merata ketika status darurat kekeringan ditetapkan.

**ANGGOTA KOMISI A DPRD
JATIM TEKANKAN
PENTINGNYA PEMETAAN
WILAYAH RAWAN
KEKERINGAN**



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

LENTERA.co Home EPaper Headline Trending Aktual Opini Gaya Hidup

Anggota Komisi D DPRD Jatim Tekankan Pentingnya Pemetaan Wilayah Rawan Kekeringan

18 JUNE 2026



Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono

SURABAYA (Lentera) – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, khususnya di Kabupaten Pacitan dan sejumlah daerah lain yang berpotensi mengalami krisis air bersih.



SURABAYA: Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Agus Cahyono mengatakan pihaknya berharap agar Pemprov mengalokasikan anggaran untuk menambah kesejahteraan bagi guru PPPK yang ada di Jatim.

Politisi PKS tersebut mengatakan sebelum merealisasi hal tersebut tentunya Pemprov harus terlebih dahulu harus memiliki satu data yang valid terkait dengan jumlah murid dan kebutuhan guru. "Perlunya data tersebut untuk mengetahui kebutuhan guru di sebuah lembaga pendidikan yang tidak bisa di-back up oleh guru yang ada, baik yang statusnya ASN maupun PPPK," ungkap pria yang akrab dipanggil Agus Cah, Jumat (26/6/2026).

Agus Cahyono mengatakan selain itu juga yang perlu diperhatikan juga pola rekrutmen guru yang ada di Jatim. "Tentunya harus melalui satu proses yang baik, mulai dari tes kompetensi atau ada standarisasi seleksi. Itu poinnya," jelas pria asal Trenggalek ini. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan mengapa gaji guru sampai saat ini belum bisa dinaikkan. Menurut mantan menhan ini, hal itu disebabkan adanya kebocoran keuntungan negara lewat under-invoicing di mana ada pengusaha yang membuat laporan palsu dari komoditas alam Indonesia. (Yudhie)

sumber: jakartanews.id

PEMERINTAH UNGKAP BELUM BISA TAMBAH GAJI GURU, AGUS CAHYONO: PERLU TAMBAHAN SUNTIKAN DARI APBD



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)





PERTAMAX

16.250

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter menuai perhatian berbagai kalangan. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, menilai kenaikan tersebut berpotensi memberikan tekanan cukup besar terhadap masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah. Menurut Khusnul, lonjakan harga Pertamax dapat mengubah pola konsumsi BBM masyarakat. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, sebagian pengguna Pertamax diperkirakan akan beralih ke BBM bersubsidi, sehingga berpotensi meningkatkan beban konsumsi Peralite. "Ini tentu cukup berdampak kepada masyarakat kelas menengah. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan terus-menerus, maka banyak masyarakat yang kemungkinan beralih dari Pertamax ke Peralite," ujarnya.

Anggota Fraksi PKS Jatim asal Dapil Lumajang-Jember itu mengingatkan bahwa perpindahan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi dapat memunculkan persoalan baru. Salah satunya adalah meningkatnya tekanan terhadap ketersediaan BBM subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Dengan semakin banyak masyarakat yang beralih ke Peralite, tentu kuota dan ketersediaannya akan semakin terbatas. Padahal BBM subsidi itu harus diprioritaskan bagi masyarakat ekonomi bawah yang memang membutuhkan," katanya. Khusnul berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga energi agar tidak menimbulkan efek domino terhadap sektor lain.

**HARGA PERTAMAX
NAIK JADI RP16.250,
KHUSNUL KHULUK
INGATKAN DAMPAK
BERANTAI BAGI
MASYARAKAT**

Menurutnya, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan, tetapi juga dapat merembet ke berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari melalui kenaikan biaya distribusi dan transportasi. "Pemerintah harus terus berupaya menstabilkan harga BBM agar tidak berdampak ke mana-mana. Sebab dampaknya bukan hanya pada sektor transportasi, tetapi juga bisa memengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat," jelasnya. Ia menambahkan, ketika biaya operasional dan distribusi meningkat akibat kenaikan harga BBM, maka pelaku usaha berpotensi melakukan penyesuaian harga barang dan jasa. Jika hal tersebut terjadi secara luas, daya beli masyarakat akan semakin tertekan.

Karena itu, Khusnul meminta pemerintah untuk terus memantau perkembangan di lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi agar gejolak harga energi tidak berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok yang memberatkan masyarakat. "Kita berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga BBM sehingga tidak menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat kecil tetap terlindungi dan daya beli masyarakat tetap terjaga," pungkasnya.



Pemerintah harus terus berupaya menstabilkan harga BBM agar tidak berdampak ke mana-mana. Sebab dampaknya bukan hanya pada sektor transportasi, tetapi juga bisa memengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur berpotensi memunculkan dampak serius terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, meminta pemerintah dan PLN segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut sebelum kerugian yang dialami masyarakat semakin meluas. Menurut Khusnul, pemadaman listrik bukan sekadar persoalan terganggunya aktivitas rumah tangga, tetapi telah menyentuh sektor-sektor produktif yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. "Pemadaman listrik secara bergiliran ini memang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Dampaknya dirasakan langsung oleh peternak, pelaku UMKM, dan berbagai usaha kecil yang bergantung pada pasokan listrik," ujar Khusnul.

Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Lumajang-Jember itu mencontohkan sektor peternakan ayam modern yang saat ini banyak menggunakan sistem otomatis berbasis listrik untuk mengatur suhu kandang, ventilasi udara, hingga kebutuhan pakan ternak. Menurutnya, gangguan pasokan listrik dapat menimbulkan risiko besar bagi peternak, terlebih jika terjadi kendala pada genset cadangan yang digunakan saat listrik padam. "Di peternakan ayam misalnya, banyak yang menggunakan sistem khusus berbasis listrik. Ketika listrik padam dan terjadi gangguan pada genset, maka ayam-ayam bisa banyak yang mati. Ini tentu sangat meresahkan peternak karena kerugiannya tidak sedikit," katanya. Selain sektor peternakan, Khusnul juga menyoroti dampak yang dirasakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak usaha rakyat yang saat ini mengandalkan listrik sebagai penunjang utama operasional mereka.

**LISTRIK PADAM,
EKONOMI RAKYAT
TERANCAM,
KHUSNUL DPRD
JATIM MINTA
PEMERINTAH
SEGERA
BERTINDAK**

la mencontohkan usaha kedai kopi yang sebagian besar peralatannya menggunakan tenaga listrik. Ketika pasokan listrik terganggu, aktivitas usaha pun praktis terhenti. "Para pelaku UMKM juga akan lumpuh total jika pemadaman berlangsung lama. Penjual kopi misalnya, sebagian besar alat produksinya menggunakan listrik. Ketika listrik mati, mereka kebingungan dan tidak bisa melayani pelanggan secara maksimal," ujarnya. Khusnul menilai masih banyak sektor usaha lain yang menghadapi kondisi serupa, mulai dari industri makanan dan minuman, percetakan, pengelasan, hingga usaha penyimpanan produk yang membutuhkan pasokan listrik stabil. Karena itu, ia mendesak pemerintah segera menuntaskan akar persoalan yang menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir.

Menurutnya, apa pun penyebabnya, baik karena kendala pasokan batu bara, gangguan sistem kelistrikan, maupun faktor cuaca yang memengaruhi pembangkit listrik, harus segera dicari jalan keluarnya. "Yang terpenting pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini. Apakah karena pasokan batu bara berkurang, gangguan sistem, atau faktor cuaca yang memengaruhi pembangkit listrik, semuanya harus segera ditangani," tegasnya. Khusnul juga meminta agar kondisi yang terjadi di daerah disampaikan secara utuh kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden, sehingga dampak riil yang dirasakan masyarakat dapat menjadi perhatian bersama.

"Ini harus terus disuarakan sampai ke Pak Presiden. Biar beliau tahu bahwa yang terjadi di bawah bukan hanya sekadar lampu padam, tetapi berpengaruh langsung terhadap perekonomian masyarakat bawah," katanya. Khusnul berharap pemerintah dapat bergerak cepat mengatasi persoalan tersebut agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu lebih lama. Menurutnya, stabilitas pasokan listrik merupakan salah satu syarat utama bagi keberlangsungan usaha rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah. "Jangan sampai masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Pemerintah harus hadir memastikan pasokan listrik kembali normal agar roda perekonomian rakyat tetap berjalan," pungkasnya.



Jangan sampai masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Pemerintah harus hadir memastikan pasokan listrik kembali normal agar roda perekonomian rakyat tetap berjalan. Ini harus terus disuarakan sampai ke Pak Presiden.

*Drs.H.M. Khusnul Khuluk
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Anggota Fraksi PKS*

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)





Galeri Foto Kegiatan



Penganugerahan Maklumat Partnership Awards 2026
Kategori Politisi Peduli Ekonomi Kreatif

Minggu, 14 Juni 2026
Hotel Santika Premiere Gubeng Sby



Pembukaan UPA Srikandi Speed

Selasa, 16 Juni 2026
Joglo Harmony



Galeri Foto Kegiatan



Audiensi DPM Fakultas Hukum Unmer Malang
di DPRD Jatim.

Selasa, 9 Juni 2026
DPRD Prov Jatim



Audiensi mahasiswa dan dosen Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik Unair Surabaya

Kamis, 11 Juni 2026
DPRD Prov Jatim



Kegiatan turba atau biasa di sebut kundapil untuk menyapa dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat yg ada di dapil.

Senin, 15 Juni 2026
Yayasan Khairul Falah
15 Orang



Sosialisasi Dewan (SOWAN)



Dapil 9
Juni 2026
Konstituen



Galeri Foto Kegiatan



Sosialisasi Rekayasa Peningkatan Nilai
Ekonomi Sumberdaya Alam untuk
Kesejahteraan Masyarakat

Dapil 9, Trenggalek
Minggu, 28 Juni 2026
Konstituen



Sosialisasi Rekayasa Peningkatan Nilai
Ekonomi Sumberdaya Alam untuk
Kesejahteraan Masyarakat

Dapil 9, Trenggalek
Minggu, 28 Juni 2026
Konstituen



**Sosialisasi Rekayasa Peningkatan Nilai Ekonomi
Sumberdaya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat**

Dapil 9, Trenggalek
Minggu, 28 Juni 2026
Konstituen



Sosialisasi Dewan (SOWAN)

Juni 2026
Konstituen



Galeri Foto Kegiatan



**Tasyakuran dan Sosialisasi Dewan
(SOWAN)**

Juni 2026
Konstituen



Sosialisasi Dewan (SOWAN)

Juni 2026
Konstituen

FRAKSI PKS PROVINSI DPRD JAWA TIMUR



PKS



www.fraksipksjatim.id



[fraksipksjatim](#)